

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yang luas daratannya lebih kecil daripada luas laut atau biasa disebut dengan negara maritim, demikianlah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan negara Indonesia. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, ribuan gugusan pulau membentang disepanjang garis teritorial wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia, karena memiliki ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang (coral reefs), padang lamun (sea grass beds), yang sangat luas dan beragam. Wilayah pesisir dan lautan Indonesia juga kaya akan bahan tambang dan mineral; seperti minyak dan gas, timah, biji besi, bauksit dan pasir kwarsa (Dahuri,2008:1).

Dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara maritim dengan garis pantai kurang lebih 81.000 km, sangatlah relevan jika banyak penduduk Indonesia merupakan masyarakat yang hidup dikawasan pesisir, kawasan pesisir mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat yang mendiaminya karena sepanjang wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya alam hayati maupun non-hayati, sumber daya buatan serta jasa lingkungan yang sangat penting bagi

penghidupan masyarakat. Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang tinggal dan melakukan aktifitas sosial ekonomi yang terkait dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumberdaya pesisir dan lautan.

Masyarakat pesisir sendiri dapat dimaknai berdasarkan definisi tentang masyarakat yang disampaikan oleh para ahli, salah satunya menurut Horton et al (dalam Satria, 2015:8) mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut. Dalam konteks masyarakat pesisir, wilayah yang didiami adalah wilayah pesisir pantai yaitu suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat pesisir adalah sekumpulan manusia yang hidup di kawasan pesisir dengan rentang waktu yang cukup lama dan menggantungkan kehidupannya dari hasil sumber daya alam pesisir dan lautan serta memiliki suatu kebudayaan sama.

Memiliki sumber daya alam yang melimpah baik yang bersifat hayati maupun non-hayati yang sangat potensial, seharusnya sudah bisa menjadikan masyarakat pesisir di Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera. Namun kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, kondisi masyarakat pesisir Indonesia terbilang memprihatinkan banyak masalah yang justru menerpa sebagian besar masyarakat pesisir di Indonesia, kebijakan pemerintah yang terlalu pro daratan membuat masyarakat daerah pesisir menjadi terabaikan dan membuat masyarakat pesisir menjadi susah untuk memanfaatkan sumber daya alam pesisir dan lautan secara

maksimal. Sehingga kondisi yang demikian ini menjadikan sebagian besar masyarakat pesisir berada dibawah garis kemiskinan. Kondisi yang terabaikan ini juga membuat masyarakat pesisir menjadi mudah untuk dimanipulasi oleh pihak luar yang berniat untuk mengeksploitasi sumber daya alam di daerah pesisir dan lautan tersebut.

Manipulasi yang dilakukan oleh pihak luar ini tentunya akan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat pesisir. Selain rusak dan berkurangnya sumber daya alam yang ada, masyarakat pesisir juga akan rentan terhadap potensi terjadinya konflik yang dapat merusak sistem sosial serta budaya yang ada di dalam masyarakat tersebut. Salah satu kasus manipulasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berupaya memperoleh keuntungan sehingga memunculkan Potensi terjadinya konflik terjadi pada masyarakat pesisir yang ada di Kecamatan Parit Tiga, yaitu di kawasan pesisir Desa Teluk Limau. Konflik yang terjadi bermula pada tahun 2009, ketika ada pihak luar yang berkeinginan untuk mengeksploitasi biji timah di wilayah perairan laut Desa Teluk Limau menggunakan Kapal Isap Produksi (KIP). Rencana dari pihak luar ini langsung mendapatkan respon negatif dari masyarakat yang menolak dengan tegas beroperasinya KIP di wilayah perairan laut mereka.

Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Teluk Limau pada saat itu berhasil membuat KIP gagal beroperasi di wilayah laut mereka. Namun, dua tahun setelah kejadian tersebut yaitu pada akhir tahun 2010, KIP kembali mencoba untuk beroperasi dan kali ini pihak luar tersebut memiliki modal yang cukup kuat, yaitu dengan mengantongi surat izin dari Bupati Bangka Barat dan

Camat Parit Tiga yang membuat mereka dengan mudah dapat langsung beroperasi di perairan laut Desa Teluk Limau. Beroperasinya KIP di laut Desa Teluk Limau membuat kondisi masyarakat menjadi tidak kondusif, masyarakat terpecah menjadi dua kubu yaitu kubu pro dan kubu kontra. Kubu masyarakat yang kontra melakukan berbagai tindakan untuk menghentikan beroperasinya KIP, mulai dari demonstrasi, mendatangi beberapa lembaga pemerintah, dan pada akhirnya melakukan penghentian paksa KIP dan tindakan anarkisme kepada kubu masyarakat pro KIP.

Tindakan anarkisme yang dilakukan oleh masyarakat kontra KIP ini berdampak buruk terhadap pola sosial budaya yang ada di dalam masyarakat, yaitu berimplikasi terhadap sistem kekerabatan yang selama ini terjalin diantara masyarakat. Semulanya Desa Teluk Limau merupakan desa dengan penduduk yang memiliki hubungan sosial yang baik, tercermin dari sistem kekerabatan erat yang terjalin antar sesama masyarakatnya.

Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Mayer Fortes (dalam Juliardi 2014), mengemukakan bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya. Pada masyarakat Teluk Limau sistem kekerabatan terbentuk oleh anggota masyarakat yang pada dasarnya terdiri dari beberapa keluarga besar yang saling berhubungan.

Struktur-struktur kekerabatan mencakup kekeluargaan dan bentuk kelompok yang merupakan perluasan keluarga seperti suku atau klen. Ikatan diantara orang yang bukan keluarga melahirkan banyak macam bentuk pengelompokan dan ketika kelompok-kelompok tersebut menjalani ikatan yang intim dan harmonis maka lama kelamaan akan semakin memperkuat hubungan-hubungan di dalam kelompok tersebut dan terbentuklah kelompok kekerabatan yang baru.

Sistem kekerabatan di Desa Teluk Limau sudah berlangsung sangat lama, terbentuk melalui proses sosial yang berlangsung didalam kehidupan masyarakat yang kemudian memunculkan suatu modal sosial seperti kuatnya rasa solidaritas dan rasa saling memiliki satu sama lain, sehingga warga senantiasa saling membantu antara satu sama lain disaat mereka mengalami kesulitan. Ciri dari sistem kekerabatan ini berupa intimnya silaturahmi yang terjalin antar warga, terwujud melalui kunjungan kerumah, berkumpul bersama, atau sekedar tegur sapa. Kuatnya sistem kekerabatan ini juga tercermin dari kekompakan masyarakat pada berbagai kegiatan yang biasa dilakukan di desa, seperti misalnya pada kegiatan sedekah dan gotong royong dalam melakukan berbagai macam kegiatan.

Namun pasca terjadinya konflik, sistem kekerabatan yang semula tampak sangat jelas dari interaksi antar warga di Desa Teluk Limau terindikasi mulai memudar. Justru aura pertentangan dan permusuhan yang kini tampil dominan menggambarkan interaksi antar warganya. Konflik mulai menjadi agenda

masyarakat dimana intensitasnya terbilang cukup tinggi dengan ketegangan yang sangat kuat.

Dampak konflik kepentingan terhadap sistem kekerabatan pada masyarakat pesisir di Desa Teluk Limau ini lah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Peneliti tertarik untuk menelaah sejauh mana implikasi antara konflik kepentingan yang terjadi dengan sistem kekerabatan di desa Teluk Limau. Sehingga kemudian menyusun suatu judul penelitian yaitu *“Konflik Kepentingan dan Implikasinya Terhadap Sistem Kekerabatan Pada Masyarakat Pesisir di Desa Teluk Limau Kecamatan Parit Tiga”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk memperjelas fokus kajian dalam skripsi ini penyusun akan merumuskan pokok permasalahan penelitian ke dalam tiga poin berikut :

1. Bagaimanakah sistem kekerabatan yang berlangsung selama ini di Desa Teluk Limau?
2. Bagaimanakah proses terjadinya konflik kepentingan di Desa Teluk Limau?
3. Bagaimanakah dampak konflik kepentingan terhadap sistem kekerabatan di Desa Teluk Limau?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan sistem kekerabatan yang berlangsung di Desa Teluk Limau
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses terjadinya konflik kepentingan di Desa Teluk Limau
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak konflik kepentingan terhadap sistem kekerabatan di Desa Teluk Limau

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dan menambah literatur terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya sosiologi konflik dan perubahan sosial dalam mengkaji berbagai fenomena yang terjadi di dalam masyarakat yang berkaitan dengan konflik dan pengaruhnya terhadap sistem kekerabatan masyarakat.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan konflik yang menjadi tema penelitian agar dapat mencari jalan penyelesaian konflik serta agar dapat mempertahankan sistem kekerabatan yang ada.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam tulisan ini peneliti akan memaparkan tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini, dengan fungsi sebagai peninjauan kembali pustaka tentang masalah yang berkaitan serta sebagai penunjang untuk lebih memperkuat penelitian ini dan juga sebagai pembuktian keaslian penelitian.

Penelitian pertama dilakukan oleh Wahyono Setyawan (2012) mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan judul “ *Konflik Antara Masyarakat Dengan Penambang Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo)*”. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyono ini membahas tentang konflik yang terjadi di areal penambangan pasir besi di Desa Garongan, melalui penelitian ini Wahyono berusaha untuk memetakan konflik dan mengkaji tentang faktor-faktor yang melatar belakangi konflik, dampak dari adanya konflik, serta upaya dari masyarakat dan pemerintah untuk menghadapi dan meminimalisir konflik.

Konflik penambangan pasir besi ini bermula setelah pemerintah melakukan kebijakan akan segera melakukan penambangan pasir besi di area pesisir selatan Kulon Progo. Kebijakan ini ditentang keras oleh masyarakat sekitar, karena lahan pesisir tersebut merupakan tempat pertanian masyarakat yang merupakan satu-satunya mata pencaharian mereka. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi konflik penambangan pasir besi ini, yang *pertama* adalah status kepemilikan lahan, lahan yang menjadi tempat penambangan ini menjadi konflik atas kepemilikan yang sah.

Pemerintah mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik Paku Alam Group (PAG) yang telah lama digarap warga sebagai lahan pertanian. Sementara warga membantah klaim dari pemerintah tersebut dan mengatakan bahwa tanah itu adalah milik warga yang diperoleh dari nenek moyang secara turun temurun. Perihal *kedua* yang menjadi latar belakang penyebab konflik adalah perbedaan kebudayaan antara masyarakat dengan pemerintah bersama penambang pasir besi. Kebudayaan masyarakat Jawa khususnya masyarakat pesisir adalah sebagai petani, apabila lahan pertanian diganti dengan lahan penambangan pasir besi, maka kebudayaan bertani yang sudah turun temurun dilakukan masyarakat akan hilang.

Penyebab *Ketiga*, yaitu perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat berkepentingan untuk tetap mempertahankan lahan yang selama ini dijadikan sebagai tempat untuk bertani yang merupakan mata pencaharian mereka satu-satunya. Sedangkan pemerintah memiliki kepentingan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan membuka lapangan pekerjaan dengan membuka penambangan tersebut. Selain ketiga latarbelakang konflik tersebut, Wahyono juga menemukan dua bentuk konflik yang terjadi, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal dalam penambangan pasir besi di Kulon Progo ini terjadi antara petani lahan pantai dengan pemerintah. Sedangkan konflik horizontal terjadi didalam kubuh masyarakat itu sendiri yaitu antara masyarakat yang pro dan masyarakat yang kontra terhadap penambangan pasir besi ini. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik ini yaitu, lunturnya sikap gotong royong dan lunturnya sikap kemanusiaan. Dimana konflik yang

menyebabkan perpecahan didalam masyarakat telah membuat hubungan masyarakat menjadi renggang terutama antara masyarakat pro dan kontra, kekuatan sosial masyarakat menjadi luntur dan budaya masyarakat menjadi hilang.

Terdapat banyak kesamaan dengan penelitian ini terutama dari segi kajian konflik dan dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik, kesamaan lainya dapat dilihat dari teori yang dijadikan sebagai pisau analisis yaitu menggunakan teori Konflik Ralf Dahrendorf serta metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah dari segi kelompok masyarakat yang dikaji, yaitu kalau penelitian dalam tulisan ini mengkaji tentang masyarakat pesisir yang lebih berbasis nelayan, sedangkan penelitian yang dilakukan wahyono mengkaji masyarakat pesisir yang lebih berbasis kepada petani, dimana kedua basis masyarakat tersebut memiliki karekteristik yang berbeda.

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Silvi Efiliana (2014) mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung dengan judul *Konflik Pendirian Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah Dalam Perspektif Ralf Dahrendorf*. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Efiliana mendapatkan hasil penelitian berupa proses terjadinya konflik dalam pendirian SPPBE di Desa Jeruk Kecamatan Pangkalan Baru yang bermula sekitar bulan mei 2012. Konflik terjadi karena tidak adanya sosialisasi dari pihak perusahaan kepada masyarakat Air Mesu Timur. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial

yang terjadi pada masyarakat Air Mesu Timur, masyarakat bersepakat untuk tidak menyetujui pendirian SPPBE karena khawatir akan dampaknya.

Efiliana juga menemukan dua bentuk konflik kepentingan yaitu konflik kepentingan manifes merupakan yang disadari semua pihak untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, yaitu pendirian SPPBE dimana pihak perusahaan didalam mendirikan bangunan tersebut untuk menambah omset atau investasi pengusaha terutama bagi pihak perusahaan SPPBE tersebut. Kepentingan manifes juga tampak pada masyarakat Desa Jeruk yang berasumsi mengikuti prosedur yang telah ada dan yang penting mereka bisa bekerja di perusahaan tersebut. Bentuk konflik kedua yaitu konflik laten merupakan tingkah laku potensial yang telah ditentukan seseorang karena dia menduduki peranan tertentu tetapi belum disadari. Didalam pendirian pembangunan SPPBE yang telah diatur oleh pihak perusahaan dan tetapi belum disadari oleh pihak tersebut. Bayangan keuntungan perusahaan didalam distribusi pengisian bahan bakar elpiji dipastikan didistribusi elpiji berjalan dengan lancar.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada segi konflik kepentingan yang terjadi dalam masyarakat yang sama-sama dijelaskan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif serta dianalisis dengan teori konflik kepentingan dari Ralf Dahrendorf. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya pada penelitian yang dilakukan oleh Efiliana hanya memfokuskan pada proses dan bentuk dari konflik kepentingan yang terjadi sedangkan peneliti selain berfokus pada konflik kepentingan, juga lebih mendalami terhadap dampak dari konflik

kepentingan tersebut terhadap kehidupan sosial masyarakat terutama sistem kekerabatan.

Penelitian ketiga yang akan dijadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Murni Ratnasari (2011) mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul ***Industrialisasi dan Perubahan Sosial (Studi Tentang Konflik Laten antara PT. Aneka Tambang dan Masyarakat Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara)***. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif, Murni mengemukakan konflik yang terjadi antara PT. Aneka Tambang (ANTAM) dengan masyarakat Desa Tambea disebabkan karena ada rasa kecemburuan sosial masyarakat terhadap bantuan yang diberikan oleh PT. ANTAM yang dianggap tidak dibagikan secara adil.

Sebenarnya, PT. ANTAM telah melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat dari penambangan yang dilakukan di daerah pabrik tersebut beroperasi dengan memberikan bantuan. Tetapi, baru 10 tahun terakhir bantuan-bantuan PT. ANTAM diberi nama program-program CSR seiring berjalannya definisi CSR tersebut dalam perusahaan. Hubungan masyarakat pada desa Tambea awalnya harmonis sebelum program-program CSR diberikan. Kecemburuan kepada para penerima bantuan merupakan awal dari hubungan yang tidak harmonis tersebut.

Konflik yang terjadi antara PT. Aneka Tambang dan Masyarakat desa Tambea melingkupi beberapa aspek, yaitu:

- a. Hubungan Antara Masyarakat dengan Masyarakat dalam Tingkat Sosial

- b. Hubungan antara Masyarakat dengan Pihak Perusahaan dalam Tingkat Ekonomi, Kesehatan, dan Budaya
- c. Hubungan antara Masyarakat dengan PT. Aneka Tambang dalam Tingkat Politik dan Hukum

Dampak yang ditimbulkan dari konflik ini yaitu hilangnya rasa solidaritas di antara masyarakat lantaran masyarakat saling memiliki prasangka terkait bantuan yang diberikan oleh PT. ANTAM. Berawal dari kecemburuan kepada orang-orang yang mendapatkan bantuan PT. ANTAM, menimbulkan perselisihan dengan tidak saling bertegur sapa. Hubungan antar tetangga yang dulu akrab dan bersahabat serta rasa kekeluargaan yang tinggi berubah menjadi dingin dan tidak bersahabat lagi. Hal ini tercermin dari hubungan antara masyarakat dalam tingkat sosial.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Murni yaitu terletak pada konflik yang terjadi. Konflik yang menjadi permasalahan dapat dikategorikan kedalam konflik kepentingan lantaran masing-masing pihak yang berkonflik saling mengutamakan kepentingannya, seperti misalnya PT. ANTAM Yang berkepentingan untuk menambah penghasilannya dengan mengeksploitasi mineral yang ada di Desa Tambea, dan masyarakat yang memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan dari bantuan yang diberikan oleh PT. ANTAM sehingga saling berebut dan menimbulkan perpecahan didalam kehidupan sosial. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu ini yaitu konflik yang terjadi di Desa Tambea ini masih bersifat laten sedangkan dalam penelitian ini konflik sudah bersifat manifes dan menimbulkan dampak yang lebih nyata.

F. Landasan Teori

1. Teori Konflik

Teori konflik yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah teori konflik yang dilandasi oleh perbedaan kepentingan. Di dalam suatu masyarakat terdapat beragam perbedaan yang mendasari terciptanya hubungan sosial yang sangat kompleks. Perbedaan-perbedaan tersebut semakin tampak taatkala kita meninjau kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia yang merupakan negara multikulturalisme yang terdiri dari beragam jenis suku, etnis, ras dan agama. Sejalan dengan multikultur yang ada disetiap masyarakat itu, beragam jenis perbedaan juga terdapat dalam diri individu masyarakatnya seperti perbedaan tujuan hidup, kedudukan sosial, kekuasaan dan perbedaan kepentingan. dari berbagai perbedaan itulah yang kemudian menjadi akar dari penyebab konflik dimana apabila perbedaan-perbedaan tersebut masih ada maka konflik juga akan terus terjadi didalam masyarakat.

Teori konflik adalah suatu perspektif dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dimana komponen yang satu berusaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentinganya atau memperoleh kepentingan yang sebesar-besarnya. Pada dasarnya pandangan teori konflik tentang masyarakat sebetulnya tidak banyak berbeda dari pandangan teori fungsionalisme struktural karena keduanya sama-sama memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian. Perbedaan antara keduanya terletak dalam asumsi mereka yang berbeda-

beda tentang elemen-elemen pembentuk masyarakat itu. Menurut teori fungsionalisme struktural, elemen-elemen itu fungsional sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa berjalan secara normal. Sedangkan bagi teori konflik, elemen-elemen itu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda sehingga mereka berjuang untuk saling mengalahkan satu sama lain guna memperoleh kepentingan sebesar-besarnya. (Raho, 2007:71)

Dalam karya Dahrendorf (1958,1959), pendirian teori konflik dan teori fungsional disejajarkan. Menurut para fungsionalis, masyarakat adalah statis atau masyarakat berada dalam keadaan berubah secara berimbang. Tetapi menurut Dahrendorf, dan teoritis konflik lainnya, setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan. Fungsionalis menekankan keteraturan masyarakat, sedangkan teoritis konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Fungsionalis menyatakan bahwa setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas. Teoritis konflik melihat berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan (Ritzer & Goodman, 2010:153).

Dahrendorf (1959,1968) adalah tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena itu teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian: teori konflik dan teori konsensus. Teori konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan teoritis konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama dihadapan tekanan itu. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat takkan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi kita tak akan punya konflik kecuali ada konsensus

sebelumnya. Sebaliknya konflik dapat menimbulkan konsensus dan integrasi. Contohnya adalah aliansi antara Amerika Serikat dan Jepang yang berkembang sesudah Perang Dunia II (Ritzer & Goodman, 2010:153-154).

Bagi Dahrendorf, model konsensus dari masyarakat adalah suatu “utopia”. Dia meyakini bahwa paksaan yang di tegakkan dan bukanlah kerja sama yang mengikat masyarakat menjadi bersama. Apakah masyarakat itu kapitalis, sosialis, feodal, atau apapun juga, beberapa orang memegang kekuasaan dan yang lain menjadi subyek kekuasaan itu. Masyarakat terbentuk atas suatu kelompok besar kelompok-kelompok kepentingan. Menurut Dahrendorf pula, semua masyarakat ditandai oleh paksaan sekelompok orang terhadap yang lain. Sifat paling penting dari kelas adalah kekuasaan (*power*) dan otoritas (*authority*). Konflik menurutnya, bisa bersifat destruktif maupun konstruktif tergantung apakah ia membawa hancurnya struktur sosial atau perubahan positif dalam ketertiban sosial (Santoso & Zulfa, 2011 :106).

Otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomi; karena itu ada dua, hanya ada dua, kelompok konflik yang dapat terbentuk didalam setiap asosiasi. Kelompok yang memegang posisi otoritas dan kelompok subordinat yang mempunyai kepentingan tertentu ”yang arah substansinya saling bertentangan”. Disini kita berhadapan dengan konsep kunci lain dalam teori konflik Dahrendorf, yakni *kepentingan*. Kelompok yang berada diatas dan yang berada di bawah didefinisikan berdasarkan kepentingan bersama. Dahrendorf tetap menyatakan bahwa kepentingan itu, yang sepertinya tampak sebagai fenomena psikologi, pada dasarnya adalah fenomena berskala luas (Ritzer & Goodman ,2010:155).

Didalam setiap asosiasi, orang yang berada pada posisi dominan berupaya mempertahankan *status quo*, sedangkan orang yang berada pada posisi subordinat berupaya mengadakan perubahan. Konflik kepentingan didalam asosiasi selalu ada sepanjang waktu, setidaknya yang tersembunyi. Ini berarti legitimasi otoritas selalu terancam. Konflik kepentingan ini tak selalu perlu disadari oleh pihak subordinat dan superordinat dalam rangka melakukan aksi. Kepentingan superordinat dan subordinat adalah objektif dalam arti bahwa kepentingan itu tercermin dalam harapan (peran) yang dilekatkan pada posisi . Individu tak selalu perlu menginternalisasikan harapan itu atau tak perlu menyadarinya dalam rangka bertindak sesuai dengan harapan itu.

Bila individu menempati posisi tertentu, mereka akan berperilaku menurut cara yang diharapkan. Individu “disesuaikan” atau “menyesuaikan diri” dengan perannya bila mereka menyumbang bagi konflik antara superordinat dan subordinat. Harapan peran yang tak disadari ini disebut Dahrendorf *kepentingan tersembunyi*. Kepentingan nyata adalah kepentingan tersembunyi yang telah disadari. Dahrendorf melihat analisis hubungan antara kepentingan tersembunyi dan kepentingan nyata itu sebagai tugas utama teori konflik. Bagaimanapun juga, aktor tak selalu perlu menyadari kepentingan mereka untuk bertindak sesuai dengan kepentingan itu (Ritzer & Goodman, 2010:156).

Selanjutnya Dahrendorf membedakan tiga tipe utama kelompok. Pertama adalah *kelompok semu (quasi group)* atau “sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama”. Kelompok semu ini adalah calon anggota tipe kedua,

yakni *kelompok kepentingan*. Kedua kelompok ini dilukiskan oleh Dahrendorf sebagai berikut:

Mode perilaku yang sama adalah karakteristik dari kelompok kepentingan yang direkrut dari kelompok semu yang lebih besar. Kelompok kepentingan adalah kelompok dalam pengertian sosiologi yang ketat; dan kelompok ini adalah agen rill dari konflik kelompok. Kelompok ini mempunyai struktur, bentuk organisasi, tujuan atau program dan anggota perorangan. (Dahrendorf, 1959)

Dari berbagai jenis kelompok kepentingan itulah muncul *kelompok konflik* atau kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok aktual.

Menurut Dahrendorf, konsep kepentingan tersembunyi, kepentingan nyata, kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok-kelompok konflik adalah konsep dasar untuk menerangkan konflik sosial. Di bawah kondisi yang *ideal* tak ada lagi variabel lain yang diperlukan. Tetapi, karena kondisi tak pernah ideal, maka banyak faktor lain ikut berpengaruh dalam proses konflik sosial.

Aspek terakhir teori konflik Dahrendorf adalah hubungan konflik dengan perubahan. Dalam hal ini Dahrendorf mengakui pentingnya pemikiran Lewis Coser yang memusatkan perhatiannya pada fungsi konflik dalam mempertahankan *status quo*. Tetapi Dahrendorf menganggap fungsi konservatif dari konflik hanyalah satu bagian realitas sosial; konflik juga menyebabkan perubahan dan perkembangan. Singkatnya Dahrendorf menyatakan bahwa segera setelah kelompok konflik muncul, kelompok itu melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan dalam struktur sosial. Bila konflik itu hebat, perubahan yang terjadi adalah radikal. Bila konflik disertai tindakan kekerasan, akan terjadi perubahan struktur secara tiba-tiba. Apa pun ciri konflik, sosiologi harus membiasakan diri

dengan hubungan antara konflik dengan perubahan maupun dengan hubungan antara konflik dan *status quo*.

Sejalan dengan apa yang dijelaskan Dahrendorf mengenai konflik, bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kepentingan, baik kepentingan yang semu maupun kepentingan nyata dimana dari kepentingan-kepentingan itu akan menghasilkan konflik kepentingan yang ujungnya akan berpengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat. Penjelasan Dahrendorf ini sejalan dengan Konflik Kepentingan yang terjadi di Desa Teluk Limau, dimana dari Konflik kepentingan yang terdiri kepentingan semu dan kepentingan nyata yang teridentifikasi ini kemudian menimbulkan konflik terbuka yang berpengaruh terhadap luntarnya sistem kekerabatan yang ada di dalam masyarakat. Sehingga teori Ralf Dahrendorf mengenai konflik kepentingan ini sangat relevan untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

2. Konsep Kohesi Sosial

Untuk menjelaskan istilah keeratan pada sistem kekerabatan dalam sosiologi di gunakan konsep kohesi sosial. Kohesi sosial (social cohesion) dapat didefinisikan sebagai perekatan yang dibangun oleh suatu komunitas berdasarkan ikatan kefamilian, klan dan genealogi dalam bingkai keetnikan. Secara etimologi kohesi merupakan kemampuan suatu kelompok untuk menyatu, dan kohesi sosial merupakan hasil dari hubungan individu dan lembaga. Pengertian mengenai konsep kohesi sosial yang asli sendiri berasal dari tesis Emile Durkheim. Menurutnya terdapat solidaritas mekanik yang diindikasikan dengan adanya aktor yang kuat dalam masyarakat, lalu terdapat solidaritas organik yang diindikasikan

dengan saling bergantungnya individu maka akan terbentuk suatu kohesi sosial dengan sendirinya. (http://m.kompasiana.com/bismasampurna/memahami-konsep-kohesi-sosial_5529357cf17e61f14a8b45c1)

Secara tipologis, kohesi sosial dapat dikategorikan secara kasar ke dalam dua tipe, yaitu kohesi sosial intramasyarakat dan kohesi sosial antarmasyarakat. Kohesi sosial intramasyarakat secara historis terbentuk melalui suatu mekanisme pembentukan sosio-kultur dalam suatu masyarakat tunggal (single society). Masyarakat tunggal lazimnya menempati satu wilayah mukim atau beberapa wilayah mukim tetapi memelihara tata adab dan tata sosial yang sama. Tata adab dan tata sosial yang sama itu menjadi panduan berinteraksi. Dalam masyarakat tunggal tertentu, perekatan ini juga ditentukan oleh jenis pekerjaan atau mata pencaharian yang dominan seperti petani atau nelayan

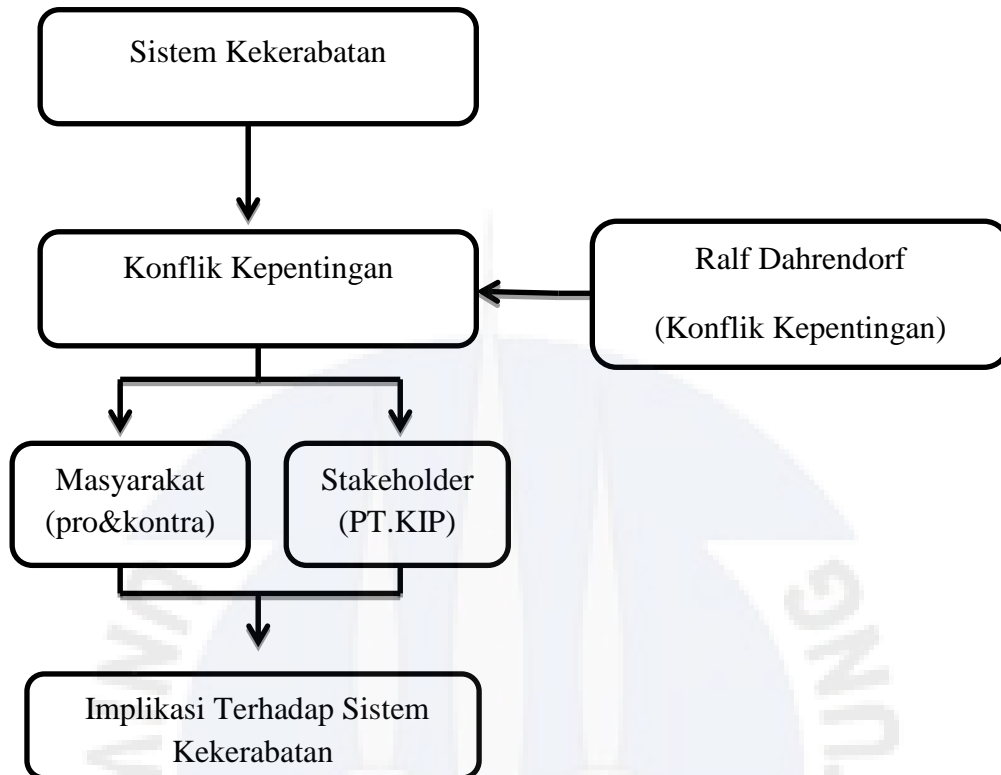
Kohesi sosial antarmasyarakat secara historis terbentuk melalui pertemuan sosial secara lintas masyarakat. Pertemuan sosial itu terbentuk oleh adanya saling butuh, kemudian membentuk suatu mekanisme sosial saling membantu. Jika kohesi sosial intramasyarakat terbentuk melalui mekanisme interaksi sosial dalam satu masyarakat tunggal yang didorong oleh kesadaran kekerabatan, kohesi sosial antarmasyarakat terbentuk lebih pada mekanisme pragmatis-ekonomis. Secara teologis-kultural, kohesi sosial antarmasyarakat mungkin dibentuk oleh semangat pertetanggaan dan saling bantu yang diolah dari sumber-sumber tata adab mengenai etika berkoeksistensi dan persamaan makhluk ciptaan Tuhan yang diambil dari teks-teks keagamaan.

Pada tingkat ini kohesi sosial sesungguhnya dapat dilihat dalam dua sudut pandang. Pertama, kohesi sosial adalah sebuah perekat yang secara fungsional merupakan kondensasi atau tepatnya kristalisasi dari adanya kesamaan famili, klan, etnik, kesamaan nasib, jenis pekerjaan, orientasi budaya, dan tujuan sosial. Dalam sudut pandang ini, pembentukan atau terbentuknya sebuah masyarakat harus melalui mekanisme penyatuan berbagai kesamaan yang disebut di atas. Dengan perkataan lain, pembentukan sebuah masyarakat harus melalui mekanisme perekatan yang kita sebut kohesi sosial.

Kedua, kohesi sosial merupakan “causa prima” bagi pembentukan masyarakat melalui ikatan famili, klan, etnik, ikatan kebangsaan, persepakatan politik, jenis kerja, dan kesamaan orientasi budaya/sosial. Dalam pandangan ini, kohesi sosial berfungsi sebagai penyuplai energi sosial bagi pembentukan masyarakat melalui mekanisme penyamaan dan kesamaan tujuan sosial. Sudut pandang pertama menganggap kohesi sosial sebagai kebutuhan, sementara sudut pandang kedua memandang kohesi sosial sebagai syarat.

<https://www.scribd.com/mobile/doc/4568418/KOHESI-SOSIAL>

G. Alur Pikir



Dari bagan alur pikir diatas tergambar bagaimana sistim kekerabatan yang mengalami pemudaran ketika terjadi suatu konflik. Kehidupan masyarakat terdapat banyak perbedaan, perbedaan tersebut telah menimbulkan berbagai perbedaan kepentingan yang akhirnya menimbulkan konflik, seperti yang dijelaskan dalam teori konflik kepentinganya Ralf Dahrendorf. Konflik dalam penelitian ini bermula dari masuknya *stakeholder* ke Desa Teluk Limau yang kemudian menimbulkan reaksi pro dan kontra didalam masyarakat yang terpecah kedalam kubu-kubu yang memiliki kepentingan berbeda dengan idealisme nya masing-masing dan pada akhirnya berpengaruh terhadap pudarnya sistem kekerabatan yang selama ini berlangsung.